Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi IV
Minggu ke-4 November
(24 s.d. 30 November 2025)
2025

BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

# OPTIMALISASI POTENSI PANGAN BIRU INDONESIA

**Firyal Nabihah**
Analis Legislatif Ahli Pertama
*firyal.nabihah@dpr.go.id*

## Isu dan Permasalahan

Indonesia memiliki modal kelautan luar biasa yang dapat menjadi tulang punggung ketahanan pangan. Namun, selama ini orientasi kebijakan pangan nasional masih berat pada produksi darat. Dengan wilayah laut seluas 6,4 juta km² dan garis pantai 108.000 km, Indonesia berada di posisi strategis untuk membangun ekosistem pangan biru sebagai sumber protein, omega-3, mineral, dan nutrisi esensial bagi masyarakat. Tren global yang menunjukkan lonjakan konsumsi protein laut harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk bergerak cepat dalam memaksimalkan peran sumber daya perairan.

Pemanfaatan pangan biru secara nasional diperkuat melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) setiap 21 November juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai nilai gizi ikan dan peluang ekonomi biru. Secara biologis, *seafood* menunjukkan efisiensi tinggi dengan tingkat *edible yield* mencapai sekitar 68 persen, jauh lebih efisien dibanding sumber protein darat karena menghasilkan emisi karbon lebih rendah dan memiliki jejak ekologis lebih minim. Selain itu, pertumbuhan pesat sektor budi daya ikan global yang telah mencapai 90 juta ton per tahun menjadi indikator kuat bahwa penyediaan pangan di masa depan tidak hanya bergantung pada daratan, tetapi juga pada ekosistem perairan.

Inisiatif KKP kini diarahkan pada akselerasi pembangunan ekosistem pangan biru melalui kebijakan berbasis inovasi dan manajemen modern. Upaya ini juga mencakup pengembangan kapasitas *human capital* melalui program seperti *Blue Ocean Strategy Fellowship*, yaitu sebuah program internal yang dirancang untuk membentuk SDM perikanan dan kelautan dengan pola pikir strategis, *entrepreneurship* sektor maritim, serta kemampuan mengoptimalkan nilai tambah berbasis pendekatan *blue economy*. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan pangan biru sebagai sumber protein massal, tetapi juga membuka rantai usaha turunan, mulai dari farmasi laut, ekstraksi bioaktif rumput laut, hingga penerapan teknologi akuakultur berpresisi.

Prospek ini diperkuat melalui langkah strategis KKP yang kini dijalankan secara lebih teknis dan berbasis sains. *Pertama*, peningkatan produksi perikanan budi daya bernilai nutrisi tinggi dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya dengan menambah volume panen, tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi akuakultur modern, seperti *recirculating aquaculture system* (RAS), *hatchery* berstandar internasional, rekayasa genetika benih unggul, serta industrialisasi rumput laut sebagai *future superfood*. *Kedua*, penguatan infrastruktur logistik dan sistem *cold chain* yang mencakup pembangunan depo pendingin di daerah sentra perikanan, transportasi rantai dingin lintas kota, sistem distribusi berbasis sensor suhu, hingga *monitoring digital platform* kualitas produk untuk menekan *food loss* dan memastikan produk laut sampai ke konsumen dalam kondisi optimal.

*Ketiga*, peningkatan literasi masyarakat mengenai ikan sebagai sumber protein utama dilakukan melalui kampanye nutrisi nasional, program gizi berbasis pangan biru di sekolah, serta penekanan pada manfaat omega-3, vitamin, dan mineral laut untuk membangun kebiasaan

konsumsi pangan laut sejak dini. *Keempat*, perluasan akses investasi bagi pembudidaya dan UMKM pesisir, dengan skema pembiayaan inklusif, inkubator bisnis kelautan, pelatihan manajemen usaha, serta pendampingan legal dan akses pasar. *Kelima*, pembentukan ekosistem pangan biru terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup standar ketelusuran hasil laut, sertifikasi mutu, kemitraan riset perguruan tinggi dengan industri, serta tata kelola berkelanjutan berbasis data untuk memastikan kesinambungan stok ikan dan keseimbangan ekologis. Dengan kebijakan yang tepat, pangan biru dapat bertransformasi menjadi penggerak ekonomi maritim nasional. Konsistensi implementasi strategi tersebut akan menempatkan Indonesia sebagai pusat produksi pangan biru dunia menuju Generasi Emas 2045.

## Atensi DPR

Pangan biru merupakan peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong ekonomi maritim berbasis keberlanjutan dan inovasi. Dalam konteks ini, Komisi IV DPR RI memiliki peran kunci melalui tiga fungsinya. Melalui fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI perlu memastikan program pangan biru yang dijalankan KKP berlangsung transparan, termasuk penerapan akuakultur modern, pengendalian *overfishing*, standar ketelusuran produk, serta penguatan sistem *cold chain* di wilayah pesisir. Melalui fungsi legislasi, Komisi IV DPR RI dapat mendorong pembentukan regulasi yang mendukung inovasi bioteknologi kelautan, pelindungan ekosistem laut, sertifikasi mutu perikanan, dan insentif fiskal bagi pelaku usaha kecil di sektor perikanan. Melalui fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI diharapkan memperjuangkan pembiayaan memadai untuk pembangunan infrastruktur budi daya laut, riset genetika benih unggul, serta pendampingan pembudidaya melalui pelatihan dan akses pasar. Dukungan yang berkesinambungan akan memastikan pangan biru menjadi pilar strategis menuju Indonesia sebagai pusat protein laut dunia sekaligus menggerakan perekonomian nasional.

## Sumber

antaranews.com, 24 dan 27 November 2025;
merdeka.com, 26 dan 29 November 2025;
republica.co.id, 29 November 2025;
rri.co.id, 25 November 2025; dan
wartaekonomi.co.id, 26 November 2025.

IsuSepekan

**Koordinator** Sali Susiana
**Polhukam** Puteri Hikmawati
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.
**Kesra** Hartini Retnaningsih

EDITOR
**Polhukam** Ahmad Budiman Prayudi, Rachmi Suprihartanti S., Novianti
**Ekkuinbang** Sri Nurhayati Q., Rafika Sari, Ari Mulianta Ginting, Eka Budiyanti, Edmira Rivani, Hilma Meilani
**Kesra** Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola, Yulia Indahri

LAYOUTER
Devindra Ramkas O., Ully Ngesti Pratiwi, Desty Bulandari, Yustina Sari
Firyal Nabihah, Ulayya Sarfina, Yosua Pardamean S, Jeffrey Ivan Vincent, Fauzan Lazuardi R, Anugrah Juwita S
Timothy Joseph S. G., Nur Sholikah P. S., Fieka Nurul Arifa

https://pusaka.dpr.go.id @pusaka_bkdprri
©PusakaBK2025
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making